

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh perusahaan saja, melainkan setiap pemerintah provinsi/kota/daerah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. Jika dalam perusahaan menggunakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, lain halnya di pemerintahan yang menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai pedomannya. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri, maka harus melakukan pertanggungjawaban atas segala wewenang yang telah diberikan. Maka dengan itu diperlukannya standar pelaporan keuangan. Namun selain adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai pedoman, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat merangkul pencapaian tersebut, yaitu adanya dukungan teknologi informasi.

Pada zaman sekarang, teknologi informasi sudah semakin canggih dan berkembang pesat, yang pada akhirnya berdampak cukup signifikan di berbagai aspek kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi,

kini penggunaan komputer telah dimanfaatkan secara meluas sebagai alat untuk melakukan proses data, komunikasi dan penyampaian informasi. Pada bidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi yang berbasis digital sudah banyak diaplikasikan di berbagai perusahaan, instansi, maupun pemerintahan, guna untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan dalam menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi yang berbasis digital sama dengan sistem informasi akuntansi yang berbasis manual. Hanya saja yang membedakannya, yaitu dalam proses pengolahan datanya, artinya jika pengolahan datanya secara manual maka dalam mengolah data dilakukan dengan mesin tik atau metode tulis tangan. Sedangkan pengolahan datanya secara digital maka dalam mengolah datanya dilakukan dengan menggunakan komputer dan memungkinkan akan banyak proses akuntansi yang tidak perlu dilakukan, karena sebagian besar proses akuntansi dapat diambil alih oleh komputer. Sehingga proses akuntansinya akan lebih cepat, efektif dan tepat waktu. Begitu juga informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan lebih berkualitas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah, maka setiap entitas pelaporan

dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Tingkat keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, salah satunya dukungan teknologi informasi. Karenanya, sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang teknis.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika dalam penyusunan laporan keuangan seluruh akun yang disajikan disusun secara jujur, tepat, teliti dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan lengkap. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakteelitian dan tingkat kesalahan para pengguna dalam penyusunan laporan keuangan, diadakanlah sistem yang dapat mendukung pencapaian tersebut, yaitu penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan, guna untuk mencapai kualitas laporan keuangan.

Penerapan teknologi informasi berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Karena sistem akuntansi pemerintah perlu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer agar efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangannya dapat tercapai. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Namun kenyataannya, masih terdapat akuntan dan para pegawai yang belum mampu menggunakan perangkat komputer secara benar dan maksimal. Sebagian besar SKPD di lingkungan Kabupaten Sukabumi sejauh ini sudah menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun ada beberapa SKPD yang belum begitu mampu menerapkan teknologi informasi, dikarenakan adanya beberapa kendala dalam penerapannya. Sehingga memungkinkan dalam pelaksanaannya akan kurang efektif dan efisien.

([www.kabupatensukabumi.go.id](http://www.kabupatensukabumi.go.id))

Menurut Menko Kesra, Agung Laksono dalam situs resminya mengemukakan bahwa:

“Pemerintah telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasis komputer dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Semua itu dilakukan dalam rangka mencapai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel yang merupakan bagian penting dalam terwujudnya *good governance*.” ([www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id))

Menurut Kepala perwakilan BPKP Provinsi Jambi Didik Krisdiyanto, menyampaikan bahwa semua SKPD harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standarnya supaya menghasilkan laporan keuangan yang tertib dan

mendapatkan opini WTP dari BPK. SIMDA sangat membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan yang tertib dan efisien. ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id))

Upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat ini dari 524 kabupaten/kota di Indonesia, belum sampai 10 persen yang mencapai opini terbaik WTP. Walaupun ada peningkatan opini WTP yang diraih pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir, namun pertumbuhannya masih terbilang minim dan lambat. Capaian opini WTP sangat penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun kenyataannya, upaya mencapai opini WTP di tingkat kabupaten/kota menghadapi kendala, salah satunya lemahnya sistem informasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus punya sistem manajemen pengelolaan keuangan yang memadai. (<http://laporankeuangantukkewajaran.blogspot.com>).

Dari hasil observasi langsung ke lapangan ditemukan bahwa dalam kegiatan penyebaran informasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Sukabumi sejauh ini sudah menerapkan teknologi informasi, tepatnya menggunakan aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangannya. “Untuk seluruh SKPD di tingkat Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh sudah menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Aplikasi yang dipakai, yaitu SIMDA Versi 2.1 yang dikeluarkan oleh BPKP dan ini sudah berjalan selama 5 tahun”, kata Ace Yusuf Friadi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya aplikasi keuangan dapat sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi lebih cepat selesai dan efektif. Sehingga laporan keuangan pun

memiliki kualitas yang baik dan mengurangi tingkat kesalahan. Hanya saja untuk CALK dan penjelasan setiap pos-pos yang ada di neraca dan LRA yang dikerjakan secara manual”, ujar Ace Yusuf Friadi.

Menurut Iyos Somantri selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa proses penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan berdasarkan ketentuan, diantaranya pencatatan sudah dilakukan dengan benar dan akurat, kemudian penyusunan laporan keuangannya sudah menggunakan sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang memadai dan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai pula, sehingga terhindar dari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya.

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban setiap Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban setiap Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan adanya aplikasi keuangan ini jelas sangat membantu, karena tidak seperti mengerjakan manual yang harus benar-benar mengerjakan dari awal sampai akhir, setiap angka-angka dan akun-akun akan terotomatis dengan sendiri, karena sudah terprogram. Semua laporan tersebut sudah dikerjakan menggunakan aplikasi, hanya saja CALK yang belum dapat dihasilkan melalui aplikasi.

Penelitian mengenai pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) mengenai Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, pengetahuan pengelola dan ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, yaitu telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik, diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dari beberapa fenomena di atas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**, guna untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan bagaimana pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Sebagai tempat pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah diperoleh peneliti dan menerapkan teori-teori yang telah didapat oleh peneliti.

**Nurul Yuniar Lediana, 2013**

Pengaruh Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi)  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, khususnya mengenai gambaran pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pemikiran yang bermanfaat bagi SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengenai pengaruh efektivitas penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

